

*Dari Cendekiawan*

# **UNTUK KEMANUSIAAN DAN PERADABAN**

Kumpulan Orasi Ilmiah 15 Profesor UIN Walisongo Semarang

Disampaikan di Hadapan Sidang Senat Terbuka  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang  
Pada Hari Kamis, 30 November 2023

Prof. Dr. H. Abdul Kholiq, M.Ag. | Prof. Dr. H. Abdul Rohman, M.Ag. |  
Prof. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D. | Prof. Dr. Ahwan Fanani, M.Ag. |  
Prof. Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. | Prof. Dr. Ali Murtadho, M.Pd. |  
Prof. Dr. H. Awaludin Pimay, Lc., M.Ag. | Prof. Dr. Baidi Bukhori, S.Ag., M.Si. |  
Prof. Dr. Ikhrom, M.Ag. | Prof. Dr. Mahfud Junaedi, M.Ag. |  
Prof. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum. | Prof. Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag. |  
Prof. Dr. H. Raharjo, M.Ed., St. | Prof. Dr. H. Sholihan, M.Ag. |  
Prof. Dr. Hj. Yuyun Affandi, Lc., MA. |



## **KATA PENGANTAR**

### **Rektor UIN Walisongo Semarang**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*  
*Bismillahirrahmanirrahim.*

Pertama-tama, marilah kita menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan dan curahan Rahmat dan nikmatNYa kepada kita semua. Shalawat dan Salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Agung Rasul Allah Muhammad SAW, semoga kita semua memperoleh syafaatnya di yaumul akhir.

Kita patut bersyukur, dan berbangga, bahwa pada tahun ini UIN Walisongo Semarang, memperoleh anugerah yang sangat luar biasa, karena memperoleh tambahan sebanyak 15 orang Profesor, sehingga jumlah guru besar yang dimiliki UIN Walisongo, secara keseluruhannya berjumlah 39 orang, dan insya Allah dalam beberapa waktu dekat akan bertambah lagi beberapa orang professor, amin. Ini akan menjadi kekuatan sangat signifikan bagi UIN Walisongo untuk mewujudkan visinya sebagai “Universitas Islam Riset Terdepan Berbasis *Unity of Science* untuk Kemanusiaan dan Peradaban Tahun 2038”.

Sebagai lembaga pendidikan tinggi, UIN Walisongo memiliki peran sentral dalam membentuk character dan intelektualitas masyarakat. Namun, dalam era digital ini, tantangan baru muncul, dan inilah mengapa peran Profesor menjadi semakin penting. UIN Walisongo diharapkan menjadi pusat pengetahuan dan inovasi.

Profesor tidak hanya sekadar pengajar, tetapi juga pembimbing dan pengarah pemikiran. Mereka memiliki tanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam pemahaman konsep-konsep yang kompleks dan memberikan arah bagi pemikiran kritis. Di era digital, di mana informasi mudah diakses, Profesor menjadi filter dan penunjuk arah yang membantu mahasiswa memahami esensi dari ilmu pengetahuan.

Profesor berperan penting dalam memimpin penelitian yang relevan dan menghasilkan inovasi. Mereka menjadi ujung tombak dalam mengeksplorasi solusi untuk tantangan zaman modern. Dengan kemajuan teknologi, Profesor memiliki peluang lebih besar untuk terlibat

dalam penelitian kolaboratif dan menghasilkan temuan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Di tengah lonjakan teknologi digital, Profesor perlu memainkan peran proaktif dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam metode pengajaran. Pembelajaran daring, platform e-learning, dan teknologi lainnya dapat membantu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Profesor dapat menjadi agen perubahan dalam menerapkan metode pembelajaran yang inovatif dan sesuai dengan tuntutan zaman.

Profesor bukan hanya sebagai sumber pengetahuan, tetapi juga mentor yang dapat memberdayakan mahasiswa. Dalam era di mana keterampilan interpersonal, pemecahan masalah, dan kreativitas sangat dihargai, Profesor dapat membantu membentuk mahasiswa menjadi individu yang siap menghadapi kompleksitas dunia kerja.

Dan kita perlu memahami bahwa Profesor bukan hanya guru di kelas, tetapi pemimpin intelektual yang membawa perubahan. Dalam era digital ini, di mana perubahan begitu cepat, peran Profesor menjadi semakin penting dalam membimbing, meneliti, dan mengajar untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.

Sebagai Rektor, kami ucapkan selamat dan sukses kepada para Guru Besar yang berjumlah 15 orang, yang hari ini dikukuhkan. Mereka adalah 1) Prof. Dr. Abdul Kholiq, M.Ag., 2) Prof. Dr. Abdul Rahman, M.Ag., 3) Prof. Dr. Abu Hapsin, MA., 4) Prof. Dr. Ahwan Fanani, M.Ag., 5) Prof. Dr. Akhmad Arif Junaedi, M.Ag., 6) Prof. Dr. Ali Murtadlo, M.Ag., 7) Prof. Dr. Awwaludin Pimai, M.Ag., 8) Prof. Dr. Baidi Bukhori, M.Si., 9) Prof. Dr. Ikhrom, M.Ag., 10) Prof. Dr. Mahfud Junaedi, M.Ag., 11) Prof. Dr. Misbah Yulfa Elizabeth, M.Hum., 12) Prof. Dr. Nur Khoirin, M.Ag., 13) Prof. Dr. Raharjo, M.Ed., 14) Prof. Dr. Sholehan, M.Ag., dan 15) Prof. Dr. Yuyun Affandi, Lc. M.Ag. Dengan iringan doa semoga membawa manfaat dan barakah bagi keluarga, lembaga, bangsa dan negara.

Semoga kita dapat bersama-sama membangun masa depan UIN Walisongo yang lebih baik di era digital ini. Terima kasih.

*Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thorieq*

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 30 November 2023

Rektor,

Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag.

## **DAFTAR ISI**

**OPTIMALISASI PERAN PTKIN DALAM MEMBANGUN EKOSISTEM  
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI INDONESIA**

Prof. Dr. H. Abdul Kholiq, M.Ag. ~ 1

**PESANTREN SEBAGAI VARIABEL PENTING BAGI EKSISTENSI DAN  
SUSTAINABILITAS SEKOLAH-MADRASAH DI INDONESIA**

**DI ERA GLOBALISASI**

Prof. Dr. H. Abdul Rohman, M.Ag. ~ 27

**LEGISLASI MORAL**

**Menakar Perdebatan antara Legal Positivis dengan Legal Moralis**

Prof. Abu Hapsin, MA., Ph.D. ~62

**MEMBUMIKAN FIKIH DALAM RUANG KE-INDONESIA-AN DALAM  
TINJAUAN METODOLOGIS**

Prof. Dr. Ahwan Fanani, M.Ag, M.S. ~ 92

**MENYINGKAP TABIR BERLIMPAHNYA KHAZANAH PENAFSIRAN  
AL-QUR'AN JAWA**

Prof. Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. ~118

**MANTRA DALAM KONSELING ISLAM**

Prof. Dr. Ali Murtadho, M.Pd. ~134

**DAKWAH MULTIKULTURAL**

**Solusi Atas Model Dakwah Dalam Menaggulangi Kekerasan  
Beragama Di Nusantara**

Prof. Dr. H. Awaludin Pimay, Lc., M.Ag. ~ 178

**KESEJAHTERAAN SUBJEKTIF MAHASISWA:  
PENGARUH SPIRITUALITAS, RASA SYUKUR, DAN DUKUNGAN  
SOSIAL DENGAN EFIKASI DIRI SEBAGAI MEDIATOR.**

Prof. Dr. Baidi Bukhori, S.Ag, M.Si. ~ 221

THE DISORIENTATION OF RELIGIOUS EDUCATION IN EMERGENCY  
CURRICULUM: LESSON LEARNED  
Prof. Dr. H. Ikhrom, M. Ag. ~ 245

IDENTITAS MADRASAH DI INDONESIA  
(*A Theoretical Construction on the Identity of Madrasah Based on  
Local Wisdom*)  
Prof. Dr. Mahfud Junaedi, M.Ag. ~ 278

KONTESTASI GENDER DALAM MASYARAKAT:  
Jalan Panjang Ketidakadilan Perempuan dalam Politik Indonesia  
Prof. Dr. Misbah Zulfa Elizabeth, M. Hum. ~ 356

MENSYARI'AHKAN PROFESI ADVOKAT  
Filosofi Bantuan Hukum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah  
Prof. Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag. ~ 392

SIKAP ILMIAH  
Implementasi dalam Pembelajaran  
Prof. Dr. Raharjo, M.Ed.St. ~ 419

ETIKA GLOBAL DAN SIGNIFIKANSINYA BAGI PERDAMAIAN DUNIA  
Kontribusi Nilai-nilai Humanistik Etika Islam  
Prof. Dr. H. Sholihan, M.Ag. ~ 492

MEMBONGKAR MISOGINIS PEREMPUAN DALAM TAFSIR FAIDH AR-  
RAHMÂN  
(Studi Hermenitika Karya Kiai Sholeh Darat)  
Prof. Dr. Hj. Yuyun Affandi, Lc., MA ~ 543

# OPTIMALISASI PERAN PTKIN DALAM MEMBANGUN EKOSISTEM PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI INDONESIA

**Prof. Dr. H. Abdul Kholiq, M.Ag.**

Guru Besar Antropologi Pendidikan Agama

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum wr. wb.

Yth. Ketua Senat UIN Walisongo Semarang

Yth. Rektor UIN Walisongo Semarang

Yth. Para Guru Besar dan anggota senat UIN Walisongo Semarang

Yth. Para Wakil Rektor, Para Dekan, Para Wakil Dekan, Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana, Para Ketua Lembaga, Kepala dan

Sekretaris SPI, Para Ketua Jurusan/Prodi dan Sekretaris

Jurusan/Prodi di Lingkungan UIN Walisongo Semarang

Yth. Kepala Biro AUPK dan AAKK, Para Kabag / Kasubag di

lingkungan UIN Walisongo Semarang.

Yth. Ketua Dharma Wanita UIN Walisongo dan jajaran pengurus

Yth. Para mitra sejawat akademika, para shahabat dan kolega

Yth. Para hadirin semua yang berbahagia.

**Pertama**, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatNya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di tempat yang berkah ini dalam rangka memberikan doa dan restu atas pengukuhan Guru Besar kami. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan ridho bagi kita semua ... Amiin.

Kedua, shalawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarga, para

shahabat dan kita semua sebagai umatnya. Semoga kita semua dapat meneladani akhlaq-akhlaq Beliau dan dapat mengikuti sunnahnya. Amiiin.

### **Bapak Ketua Senat, Rektor dan Anggota Senat serta para hadirin yang berbahagia.**

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya menyampaikan pidato pengukuhan guru besar kami, yang berjudul: OPTIMALISASI PERAN PTKIN DALAM MEMBANGUN EKOSISTEM PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI INDONESIA

Pidato ini sampaikan berdasarkan atas keprihatinan kita terhadap persoalan korupsi yang terjadi di negeri kita, yang semakin hari semakin memprihatinkan. Persoalan korupsi bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi semua pihak, termasuk perguruan tinggi keagamaan Islam. Cita-cita Indonesia bersih harus diperjuangkan melalui berbagai cara, diantaranya melalui pendidikan antikorupsi yang harus diberikan sejak dini, baik pada lingkup pendidikan informal (keluarga), non formal (masyarakat) maupun pendidikan formal (sekolah). Pada lingkup pendidikan formal, pendidikan antikorupsi harus diberikan sejak TK sampai perguruan tinggi. Sedangkan pendidikan anti korupsi hanya akan efektif jika dibangun ekosistem pendidikan yang baik pada setiap jenjang lingkungan pendidikan. Melalui ekosistem pendidikan antikorupsi yang baik, diharapkan dapat melahirkan generasi-generasi muda yang memunyai integritas yang berani menolak korupsi sekaligus berani melawan korupsi.

### **Bapak Ketua Senat, Rektor dan Anggota Senat serta para hadirin yang berbahagia**

#### **Pendahuluan**

Cita-cita para *founding fathers* untuk membangun Indonesia sebagai bangsa yang “**gemah ripah loh jinawe, tata tentrem kerto Ziinter**” harus terus diperjuangkan. Terlebih jika dilihat kondisi bangsa Indonesia saat ini, masih jauh dari yang diharapkan oleh



masyarakat Indonesia. Salah satu persoalan krusial yang harus mendapatkan penanganan segera adalah persoalan korupsi. Korupsi, di samping menjauhkan bangsa Indonesia dari terwujudnya suatu keadaan bangsa yang tertib, tentram, serta sejahtera dan berkecukupan, seperti yang dicita-citakan, pada sisi lain korupsi dapat membahayakan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara (Zaidan, 2017; Nasution, 2018; Listyorini, 2021).

Problem korupsi di Indonesia sudah sampai pada stadium sangat 3iinterpretasi (Diansyah, 2011; Hakim, 2012). Keprihatinan tersebut, pada satu sisi dipicu oleh fenomena korupsi yang sudah menjadi praktek transaksional yang dianggap wajar (*banality*) dan membudaya dalam kehidupan sehari-hari (Manurung, 2012; Umam, 2014), pada sisi lain, adanya indikasi semakin melemahnya komitmen pemerintah dalam melakukan upaya anti-korupsi. Meskipun telah dibentuk KPK (2002), tetapi hasilnya masih belum bisa mengangkat posisi Indonesia keluar dari 3iinterp negara terkorup di dunia. Berdasarkan data survey menunjukkan pada tahun 2020 skor indeks persepsi korupsi Indonesia 37 dan berada di peringkat 102 dari 180 negara yang di suvey, atau dibawah Tanzania (94), Srilanka (94) dan Timor Leste (86) (Transparency International: 2021<sup>1</sup>; Sumaryati, 2020).

Korupsi merupakan masalah social yang ditemukan dalam berbagai derajat dan bentuk di semua masyarakat (David, 2012). Korupsi bertentangan dengan nilai-nilai agama dan norma sosial, dan dituding sebagai sumber bagi munculnya persoalan-persoalan besar dalam negara (Porta, 2000; Bowser, 2001; Begovic, 2005; Seligson, 2022). Sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), korupsi harus diselesaikan dengan cara khusus. Di samping upaya pemberantasan korupsi, upaya pencegahan diperlukan untuk menekan perkembangan korupsi di Indonesia (Manurung, 2012; Suryani, 2013). Pemerintah Indonesia menetapkan strategi pencegahan korupsi diantaranya melalui pendidikan anti korupsi (Djalali, 2008; Kadir, 2018). Melalui pendidikan anti-korupsi, nilai-nilai dan semangat anti-korupsi dapat ditanamkan sejak dini, sehingga

---

<sup>1</sup> <https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl#> (Diakses tanggal 10/03/2022).

terbentuk mental dan kepribadian generasi muda yang tidak toleran terhadap korupsi serta mempunyai keberanian untuk melawan korupsi. Pendidikan anti-korupsi diperlukan untuk menciptakan budaya bersih (Aditjondro, 2002; Gusnardi, 2014). Negara yang tidak mempunyai system pendidikan (anti-korupsi) baik mengakibatkan level korupsi lebih tinggi (Evrensel, 2010). Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi harus disampaikan sejak dini, dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi (Vaknin, 2009, Akbar & Vujic, 2014).

Dalam konteks pencegahan korupsi di Indonesia, tidak berlebihan jika Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKI) diharapkan dapat berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Karena, menyanggah identitas sebagai institusi 'agama', terdapat tanggung jawab 'moral' untuk ikut membangun budaya antikorupsi di masyarakat. Civitas akademika diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak bagi terbentuknya tatanan kehidupan yang bersih dari korupsi. Seharusnya, identitas 'Islam' cukup menjadi garansi bahwa PTKI bisa menjadi contoh (*role-model*) untuk ekosistem pendidikan yang baik bagi tumbuhnya budaya anti-korupsi. Dalam perspektif pendidikan, budaya anti-korupsi hanya akan bisa dibentuk melalui pendidikan antikorupsi yang didukung dengan ekosistem pendidikan yang baik. Pertanyaannya, bagaimana ekosistem pendidikan anti-korupsi di PTKI?

Sejauh ini, studi-studi menyangkut pendidikan antikorupsi di Perguruan Tinggi secara umum mendiskusikan seputar persoalan regulasi (Kadir, 2018; Hasanah, 2018; Sujatmiko, 2021), pendidikan nilai (karakter) (Hidayat, 2019; Harto, 2016; Dewantara dkk, 2021) dan model-model implementasi pendidikan antikorupsi (Hakim, 2012; Gusnardi, 2014; Arifin, 2015; Kristiono, 2018; Prasetya, dkk., 2021). Studi-studi tersebut, lebih menitik beratkan pada bagaimana nilai-nilai antikorupsi dapat diajarkan kepada mahasiswa baik melalui matakuliah tersendiri maupun melalui model integrasi dengan matakuliah yang sudah ada. Terdapat satu aspek krusial yang tidak disinggung oleh peneliti-peneliti sebelumnya yaitu diskusi tentang ekosistem pendidikan, atau lingkungan yang menjadi faktor determinan bagi perkembangan mental dan intelektual mahasiswa. Bagaimana mental antikorupsi mahasiswa akan terbentuk, jika

lembaga tersebut masih toleran terhadap praktek korupsi atau bahkan pejabatnya terjerat kasus korupsi. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi hanya akan efektif jika ekosistem (pendidikan) di perguruan tinggi tersebut kondusif. Dalam hal ini penelitian yang melihat ekosistem pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi masih sangat terbatas.

Penelitian ini melengkapi kekurangan studi yang ada dengan melihat ekosistem pendidikan antikorupsi yang dibangun oleh perguruan tinggi keagamaan yang berimplikasi pada efektif tidaknya pendidikan antikorupsi. Terbentuknya mental karakter antikorupsi mahasiswa berkaitan erat dengan lingkungan pendidikan yang terselenggara (Duska dan Whelan, 1982; Perdana, 2018). Secara khusus, studi ini untuk menjawab, bagaimana PTKIN merespon kebijakan pemerintah untuk menginstitusikan perilaku antikorupsi melalui kewajiban menyelenggarakan mata kuliah antikorupsi. Pemahaman yang mendalam tentang ekosistem pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi keagamaan dalam berbagai dimensinya dapat memberikan model bagi pemecahan masalah dan *lesson learned* bagi penyusunan rencana aksi penanganan kasus krisis korupsi di Indonesia. Studi ini diharapkan bisa menjadi pemantik terjadinya revolusi-budaya menuju ekosistem budaya anti korupsi di Indonesia.

**Bapak Ketua Senat, Rektor dan Anggota Senat serta para hadirin yang berbahagia.**

### **Ekosistem Pendidikan**

Istilah ekosistem diperkenalkan pertama oleh seorang ahli ekologi Arthur George Tansley (1935) untuk menyebut keterkaitan diantara organisme dalam suatu lingkungan dan interaksi yang terjadi di antara organisme untuk bisa hidup bersama (Van der Valk, 2014; Lauren, 2020). Seperti halnya Tansley, Clements meyakini komunitas ekologis terbentuk sebagai hasil dari bagaimana lingkungan beroperasi dan reaksi yang dihasilkan ini menyebabkan masyarakat mengadaptasikan diri terhadap lingkungannya (McIntosh 1985; Pickett and Grove 2009; Lauren, 2020).

Ekosistem dikonsepsikan sebagai suatu kesatuan ekologi yang di dalamnya terdapat struktur dan fungsi (Tansley, 1935). Susanto (2000) mendefinisikan sebagai suatu kesatuan lingkungan yang didalamnya terdapat hubungan fungsional yang sistematis antara makhluk hidup dan makhluk hidup dengan komponen abiotic (Susanto, 2000). Chapin (2011) memaknai ekosistem sebagai kesatuan antar komponen yang tidak terpisahkan yang saling berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang teratur (Chapin, 2011). Sedangkan Thomas & Autio (2014) mendefinisikannya sebagai kumpulan organisasi jaringan yang saling bergantung terlibat dalam “penciptaan nilai bersama” (Thomas & Autio, 2014). Merujuk dari beberapa konsepsi tersebut, ekosistem dapat dipahami sebagai jaringan yang kompleks sebagai sebuah system yang saling berhubungan.

Konseptualisasi ekosistem yang bermula dari bidang biologi (ilmu alam) berkembang menjadi konsep terbuka untuk bidang lainnya (Moore, 1996; Iansiti & Levin, 2004; Thomas & Autio, 2014; Woolley, 2014; Mars & Bronstein, 2018; Norris & Suomela, 2017; Pickett & Cadenasso, 2002). Dalam bidang pendidikan, konsep ekosistem digunakan sebagai kerangka kerja untuk mendefinisikan komponen dan proses operasional pendidikan (Banu Gundogan, Eby, & Volkan Yuzer, 2014). Dalam konteks pendidikan nasional Indonesia, istilah ekosistem pendidikan tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2015-2019, yakni “Terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter yang dilandasi dengan semangat gotong royong” (Permendikbud, 2015).

Thomas & Autio (2014) mendefinisikan ekosistem dengan tiga karakteristik, yaitu jaringan yang menciptakan nilai (*value-creating networks*), sistem tata kelola (*a governance system*), dan logika bersama (*share logic*) (Thomas & Autio, 2014; Katrina Falkner, Rebecca Vivian & Sally-Ann Williams, 2018). Jaringan system nilai tidak terbatas pada lokalitas yang terdapat simbiosis antara komponen yang bersifat dinamis dan berkembang ke arah yang lebih baik (Thomas & Autio, 2014). Sistem tata kelola bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan peserta dan untuk menentukan peraturan serta norma budaya yang diperlukan (Thomas & Autio, 2014).

Sedangkan logika bersama yang terdiri dari elemen kognitif meliputi legitimasi dan makna. Legitimasi berkaitan dengan penerimaan system melalui pemahaman terhadap maksud dan tujuan ekosistem. Kebermaknaan berhubungan dengan tumbuhnya tanggung jawab dan kesadaran kolektif untuk melakukan kolaborasi dalam menghadapi tantangan, serta kesadaran untuk membangun hubungan timbal balik sehingga melahirkan identitas kolektif yang diwujudkan dalam bentuk logika bersama (Thomas & Autio, 2014; Adner, 2012; Iansti & Levien, 2004)

### **Pendidikan Antikorupsi**

Korupsi atau dalam bahasa agamanya *riswah/ghulul* mempunyai pengertian tindakan penyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan untuk kepentingan pribadi, termasuk dan terutama terkait dengan uang (Begovic, 2005; Ekiyor, 2009; David, 2012; Gusnardi, 2014). Scott (1972) berpandangan bahwa korupsi 'harus dipahami sebagai bagian yang teratur, berulang dan integral dari operasi sebagian besar sistem politik'. Dilihat dari bentuknya, korupsi tidak sebatas "penyuapan" (Hamzah, 1984), tetapi berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (2002) berupa: (1) Melawan hukum untuk memperkaya diri dan merugikan Negara, (2) Menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan Negara, (3) Menyuap pegawai negeri, (4) Memberi hadiah kepada pihak lain karena jabatannya, (5) Menerima suap, (6) Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya, (7) Menyuap, (8) Menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan, (9) Memeras pihak lain, (10) Berbuat curang, (11) Menyerobot tanah Negara dan merugikan orang lain, (12) Menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK, (13) Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan (Undang Undang Republik No. No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi).

Pendidikan antikorupsi berorientasi pada penyadaran bahaya laten korupsi, pembentukan sikap 'tidak korupsi' dan berani melawan korupsi (Wibowo, 2013). Dalam perspektif pendidikan Islam, pendidikan antikorupsi disebut sebagai *tahdhib*, proses membentuk akhlak atau budi pekerti (Ahmadi, 2001). Oleh karena itu, pendidikan

ini tidak sekedar transfer *knowledge*, tetapi memerlukan penalaran, internalisasi nilai dan moral sehingga terbentuk *akhlaq* atau karakter antikorupsi. Setidaknya, terdapat enam nilai fundamental dalam pendidikan antikorupsi, yakni kejujuran, kemandirian, keadilan, kedisiplinan, tanggung jawab dan keberanian (*syajaáh*) (Catrina dkk., 2016; Arliman, 2017). Pendidikan yang mendukung orientasi nilai tersebut adalah pendidikan yang membuat orang merasa malu apabila tergoda untuk melakukan korupsi, dan marah bila ia menyaksikannya (Kadir, 2018).

Dalam proses pembentukan karakter, penalaran moral atau nilai-nilai berkembang sejalan dengan pengaruh lingkungan (Lictona, 1991; Thompson, 1993; Friedman & Mariam, 2006; Wibowo, 2013). Lingkungan belajar menjadi faktor determinan bagi keberhasilan proses pendidikan karakter antikorupsi. Perguruan Tinggi sebagai lingkungan belajar jika dilihat dari perspektif ekosistem – meminjam teorinya Thomas & Autio (2014) dapat diuraikan dalam tiga karakteristik, yakni (1) bagaimana perguruan tinggi membangun jaringan penciptaan nilai-nilai antikorupsi (*value-creating networks*); (2) bagaimana perguruan tinggi membangun sistem tata kelola yang bersih dan transparan (*a governance system*), dan (3) bagaimana perguruan tinggi membangun kesadaran kolektif perlunya gerakan untuk melawan korupsi (*share logic*).

### **Kondisi Ekosistem Pendidikan Anti Korupsi di PTKIN**

Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi akan efektif jika dibangun dalam ekosistem budaya antikorupsi yang baik. Sebagai apapun konsep pendidikan antikorupsi jika tidak didukung oleh ekosistem yang kondusif, hanya akan menimbulkan konflik nilai bagi mahasiswa, sehingga di samping akan menimbulkan kebingungan juga penolakan terhadap nilai tersebut. Mahasiswa tidak hanya cukup menerima pengajaran (khotbah) tentang nilai, tetapi juga membutuhkan lingkungan yang kondusif, dosen yang berintegritas, pejabat kampus komitmen terhadap aktualisasi nilai, serta gerakan massif dari masyarakat kampus untuk menegakkan nilai diinterpretasi dalam perilaku sehari-hari. Oleh karena itu, ekosistem pendidikan antikorupsi membutuhkan kesesuaian antara jaringan penciptaan nilai antikorupsi (*value-creating networks*), sistem tata kelola yang

bersih dan transparan (*a governance system*), dan kesadaran kolektif perlunya gerakan untuk melawan korupsi (*share logic*).

Di bawah ini akan disajikan profile ekosistem pendidikan anti korupsi di PTKIN. Data kuantitatif digali dengan google form untuk mengumpulkan data tentang ekosistem pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi keagamaan. Teknik pengumpulan data digunakan angket, dengan variable ekosistem pendidikan antikorupsi yang meliputi indicator (1) jaringan penciptaan nilai-nilai antikorupsi (*value-creating networks*); (2) sistem tata kelola yang bersih dan transparan (*a governance system*), dan (3) kesadaran kolektif perlunya gerakan untuk melawan korupsi (*share logic*). Dari 37 PTKIN yang memberikan feedback google form yang dikirimkan sejumlah 24 PTKIN. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dan diinterpretasikan secara kualitatif melalui tabel konversi data kuantitatif skala lima berikut (Sukardjo, 2010).

**Tabel 01**  
**Konversi Skor Skala Lima**

| NILAI | INTERVAL SKOR        | DATA KUALITATIF |
|-------|----------------------|-----------------|
| A     | $X > 4,21$           | Sangat baik     |
| B     | $3,67 < X \leq 4,21$ | Baik            |
| C     | $2,60 < X \leq 3,67$ | Cukup           |
| D     | $1,79 < X \leq 2,60$ | Kurang          |
| E     | $X \leq 1,79$        | Sangat kurang   |

### **Jaringan penciptaan nilai antikorupsi (*value-creating networks*)**

Distibusi data tentang penciptaan nilai antikorupsi (*value-creating networks*) di PTKIN yang dikembangkan berdasarkan 8 butir pertanyaan (angket) dapat dideskripsikan sebagaimana dalam table 02 sebagai berikut.

**Tabel 02**  
**Distribusi Skor pada Karakteristik *Value Creation-Networking***

|                    |                                                                                                   | N  | Min. | Max. | Mean | SD    | Category |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|------|-------|----------|
| VC1                | Kurikulum semua matakuliah disusun dengan mengintegrasikan nilai-nilai yang bersumber dari Islam. | 24 | 1    | 5    | 4.04 | .999  | B        |
| VC2                | Kurikulum matakuliah sudah memuat nilai-nilai antikorupsi                                         | 24 | 1    | 5    | 3.37 | .970  | C        |
| VC3                | Sosialisasi nilai-nilai antikorupsi sudah mencukupi melalui matakuliah yang ada.                  | 24 | 1    | 5    | 3.21 | .932  | C        |
| VC4                | Tidak diperlukan secara khusus ada matakuliah antikorupsi                                         | 24 | 1    | 5    | 3.37 | 1.173 | C        |
| VC5                | Civitas akademika sudah memahami jenis-jenis korupsi                                              | 24 | 2    | 4    | 3.17 | .702  | C        |
| VC6                | Civitas akademika memahami bahaya laten korupsi                                                   | 24 | 2    | 5    | 3.96 | .806  | B        |
| VC7                | Civitas akademika berani tidak korupsi                                                            | 24 | 3    | 5    | 3.87 | .797  | B        |
| VC8                | Civitas akademika berani melawan korupsi (berani melapor jika mengetahui tindakan korupsi)        | 24 | 2    | 5    | 3.50 | .978  | C        |
| Valid N (listwise) |                                                                                                   | 24 |      |      |      |       |          |
| Rerata             |                                                                                                   |    |      |      |      | 3.56  | C        |

Sumber: Diolah berdasarkan data penelitian

Tabel 02 di atas menunjukkan jaringan nilai di PTKIN dibangun berdasarkan integrasi nilai-nilai Islam, tergambar dari kurikulum PTKIN (VC1) yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Islam



(kategori skor B). Nilai-nilai keislaman dalam kurikulum PTKIN mencakup pula nilai-nilai antikorupsi (VC2), meskipun dalam kegiatan sosialisasi nilai-nilai antikorupsi (VC3) untuk membentuk jaringan komunitas yang memiliki pemahaman dan pandangan yang sama tentang korupsi masih perlu ditingkatkan (kategori skor C). Jaringan nilai keislaman yang dikembangkan oleh kurikulum PTKIN tidak secara otomatis dapat mengantarkan pada pemahaman yang baik tentang jenis-jenis korupsi (kategori skor C). Oleh karena itu masih diperlukan secara khusus ada matakuliah (VC4) atau sosialisasi tentang antikorupsi di PTKIN (kategori skor C). Jika ditelisik dari lingkup yang lebih spesifik pada karakteristik *value creation-networking* pada (VC6) dan (VC7) menunjukkan komponen perguruan tinggi agama Islam memiliki kesadaran yang baik tentang bahaya laten korupsi (kategori skor B), serta komitmen untuk tidak melakukan korupsi (kategori skor B). Hanya saja keberanian untuk melawan korupsi (VC8) dengan melaporkan jika mengetahui tindakan korupsi di lingkungannya (kategori skor C) masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan capaian skor rerata (3.56) pada karakteristik ***Value Creation-Networking*** menunjukkan jaringan penciptaan nilai antikorupsi di PTKIN dalam kriteria cukup (kategori skor C). Dari perspektif jaringan penciptaan nilai dapat dipahami bahwa ekosistem pendidikan antikorupsi di lingkungan PTKIN secara umum cukup suportif, hanya saja masih perlu ditingkatkan menjadi lebih baik, khususnya integrasi dan sosialisasi nilai-nilai antikorupsi. Distingsi keislaman dalam kurikulum PTKIN sesungguhnya bisa menjadi modal yang baik bagi pengembangan nilai-nilai antikorupsi karena dibangun berdasarkan nilai-nilai religiusitas.

### **Sistem Tata Kelola yang Bersih dan Transparan (*Governance System*)**

Distibusi data tentang sistem tatakelola yang bersih dan transparan (*Governance System*) di lingkungan PTKIN yang dikembangkan berdasarkan 13 butir pertanyaan (angket) dapat dideskripsikan sebagaimana dalam table 02 sebagai berikut.

**Tabel 03**  
**Distribusi Skor pada Karakteristik *Governance System***

|                    |                                                                                          | N  | Min. | Max. | Mean | SD    | Category |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|------|-------|----------|
| GS1                | Komitmen pimpinan terhadap antikorupsi                                                   | 24 | 3    | 5    | 4.54 | .588  | A        |
| GS2                | Semua pejabat dan dosen membuat pakta integritas                                         | 24 | 2    | 5    | 4.21 | .833  | A        |
| GS3                | Tatakelola sudah berdasar manajemen resiko                                               | 24 | 2    | 5    | 3.92 | .830  | B        |
| GS4                | Perencanaan disusun berdasarkan IKU/Renstra                                              | 24 | 3    | 5    | 4.50 | .590  | A        |
| GS5                | RKAKL direview                                                                           | 24 | 4    | 5    | 4.67 | .482  | A        |
| GS6                | Dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program                                    | 24 | 3    | 5    | 4.42 | .654  | A        |
| GS7                | Disusun Laporan kegiatan dan keuangan yang akuntable                                     | 24 | 4    | 5    | 4.50 | .511  | A        |
| GS8                | Lembaga/satuan pengawas internal yang efektif                                            | 24 | 2    | 5    | 4.29 | .859  | A        |
| GS9                | Pejabat (KPA/PPK) menerima hadiah dari rekanan                                           | 24 | 2    | 5    | 4.29 | .908  | A        |
| GS10               | Pejabat (KPA/PPK) atau dosen menerima parcel /bingkisan.                                 | 24 | 2    | 5    | 3.96 | 1.042 | B        |
| GS11               | Masih ada pungutan kepada mahasiswa selain UKT (Misalnya biaya syukuran kelulusan, dsb.) | 24 | 1    | 5    | 4.12 | 1.227 | B        |
| GS12               | LAKIP diumumkan ke public                                                                | 24 | 1    | 5    | 3.46 | 1.062 | C        |
| GS13               | Sudah mempunyai PPID (Pejabat Pengelola Informasi & Data)                                | 24 | 2    | 5    | 4.13 | .850  | B        |
| Valid N (listwise) |                                                                                          | 24 |      |      |      |       |          |
| Rerata             |                                                                                          |    |      |      |      | 4.23  | A        |

Sumber: Diolah berdasarkan data penelitian

Berdasarkan table 03 di atas menunjukkan karakteristik *governance system* di PTKIN secara umum berjalan sangat baik. Jika ditelisik dari lingkup yang lebih spesifik pada karakteristik *governance system* pada (GS1) dan (GS2) menunjukkan para pimpinan PTKIN mempunyai komitmen yang tinggi (GS1) untuk membangun tatakelola perguruan tinggi yang bersih dan transparan (kategori skor A), dan para pejabat, dosen dan tenaga pendidikan juga mempunyai integritas (GS2) yang sangat baik (kategori skor A). Semangat untuk membangun tata kelola perguruan tinggi yang baik (*Good University Governance*) di lingkungan PTKIN sangat baik, dengan kesadaran menggunakan manajemen resiko (GS3) yang baik dalam pengelolaan organisasi (kategori skor B). Demikian juga siklus manajemen berjalan dengan sangat baik (kategori skor A), mulai dari perencanaan disusun berdasarkan Renstra/IKU (indicator Kinerja Utama) (GS4), dilakukannya review RKAKL (GS5), monitoring dan evaluasi program (GS6) dan pelaporan yang akuntabel (GS7), serta berfungsinya secara efektif system pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh SPI (GS8). Di samping itu, komponen di lingkungan PTKIN juga memiliki sinergi yang baik untuk mencegah segala tindakan korupsi, dibuktikan dengan tidak menerima gratifikasi atau tidak melakukan pungutan liar kepada mahasiswa selain UKT (uang kuliah tunggal), sebagaimana ditunjukkan pada GS9, GS10 dan GS11. Pada aspek keterbukaan tampaknya PTKIN masih perlu diperbaiki khususnya dalam mempublikasikan LAKIP (GS12) (kategori skor C), meskipun di lingkungan PTKIN sudah ada lembaga PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Data) (GS13) yang berfungsi baik (kategori skor B).

Berdasarkan data pada kriteria *governance system* sebagaimana yang disajikan pada tabel 03, PTKIN memiliki system tatakelola yang sangat suportif dalam usaha membangun ekosistem pendidikan antikorupsi ditunjukkan dengan skor rerata (4.23) (kategori skor A). Dari perspektif *governance system* membuktikan perguruan tinggi di lingkungan PTKIN dikelola dengan menggunakan prinsip-prinsip *good university governance* yakni bersih, akuntabel dan transparan. Hanya saja pada aspek transparansi masih perlu ditingkatkan menjadi lebih baik.

### Gerakan Antikorupsi (*Share Logic*)

Indikator ketiga dari variable ekosistem pendidikan antikorupsi adalah *share logic* yakni adanya gerakan antikorupsi yang dilakukan oleh masyarakat kampus di lingkungan PTKIN. Distribusi data tentang gerakan antikorupsi (*share logic*) di lingkungan PTKIN yang dikembangkan berdasarkan 5 butir pertanyaan angket dideskripsikan dalam table 05 sebagai berikut:

**Tabel 05**  
**Distribusi Skor pada Karakteristik *Share Logic***

|                    |                                                                                | N  | Min. | Max. | Mean | SD    | Category |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|------|-------|----------|
| SL1                | Kampus menyelenggarakan deklarasi antikorupsi secara terbuka.                  | 24 | 2    | 5    | 3.79 | .977  | B        |
| SL2                | Jumlah karya akademik dosen (buku/penelitian/jurnal) yang bertema antikorupsi. | 24 | 1    | 4    | 2.79 | .932  | C        |
| SL3                | Seminar/lokakarya/diskusi antikorupsi.                                         | 24 | 1    | 4    | 3.33 | .868  | C        |
| SL4                | Kampus memperingati hari antikorupsi.                                          | 24 | 1    | 5    | 3.04 | .955  | C        |
| SL5                | Kampus menggalang gerakan antikorupsi bersama mahasiswa & masyarakat.          | 24 | 1    | 5    | 3.38 | 1.096 | C        |
| Valid N (listwise) |                                                                                | 24 |      |      |      |       |          |
| Rerata             |                                                                                |    |      |      |      | 3.27  | C        |

Sumber: Diolah berdasarkan data penelitian

Berdasarkan table 05 di atas menunjukkan karakteristik pada gerakan antikorupsi (*share logic*) di lingkungan PTKIN secara umum menunjukkan belum berjalan dengan memuaskan. Padahal gerakan komunal untuk mengkampanyekan gerakan melawan korupsi yang dilakukan secara massif sangat diperlukan dalam rangka membangun ekosistem pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi. Melalui

gerakan komunal untuk antikorupsi akan melahirkan kesadaran bersama bahwa korupsi adalah musuh bersama (*common enemy*) yang harus diperangi, sehingga memunculkan sikap antipati masyarakat terhadap korupsi dan berani untuk melawan korupsi. Berdasarkan hasil penelitian, perguruan tinggi di lingkungan PTKIN sudah memiliki komitmen terhadap pemberantasan korupsi dibuktikan dengan deklarasi antikorupsi secara publik (SL1) oleh universitas (kategori skor B). Tetapi deklarasi antikorupsi tersebut tidak diikuti dengan gerakan massif baik yang bersifat akademik melalui publikasi karya akademik (SL2), seminar bertema antikorupsi (SL3), maupun gerakan social mengkampanyekan penolakan terhadap korupsi seperti memperingati hari antikorupsi (SL4) ataupun menggalang gerakan antikorupsi bersama mahasiswa dan masyarakat (SL5). Secara keseluruhan, persentase dari gerakan komunal mengkampanyekan antikorupsi tersebut masih berada dalam kategori belum signifikan (kategori skor C).

Berdasarkan capaian skor rerata (3.27) pada kriteria gerakan antikorupsi (*share logic*) di lingkungan PTKIN menunjukkan kategori cukup (kategori skor C). Capaian skor ini menunjukkan PTKIN belum maksimal dalam membangun gerakan social untuk menyadarkan masyarakat tentang bahaya korupsi. Padahal sebagai lembaga pendidikan yang berbasis keislaman, terdapat tanggung jawab moral turut berkontribusi membangun Indonesia bersih dan bebas dari ancaman korupsi. Korupsi adalah musuh masyarakat dan memerangnya adalah kewajiban agama.

**Bapak Ketua Senat, Rektor dan Anggota Senat serta para hadirin yang berbahagia.**

### **Optimalisasi Peran PTKIN dalam Membangun Ekosistem Budaya Anti Korupsi di Indonesia**

Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi selama ini berjalan sebatas teoritis, berputar-putar mempelajari nilai-nilai antikorupsi sebatas pengetahuan (Subhan, 2019). Orientasi praktek pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi belum menyentuh pada praktek pembentukan karakter mahasiswa yang berani menolak praktek korupsi dan berani melakukan aksi melawan korupsi. Sebagai habitat

masyarakat terdidik, perguruan tinggi belum bisa membuktikan sebagai institusi yang bisa berperan menjadi penjaga dan pengembang integritas bangsa sekaligus sebagai motor penggerak dari gerakan antikorupsi di Indonesia (Kadir, 2018). Di tengah krisis korupsi Indonesia, perguruan tinggi dihadapkan pada tantangan untuk mengembalikan pendidikan pada fungsinya sebagai pembentuk karakter bangsa, tidak sekedar transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, penguasaan ketrampilan dan seni, tetapi juga membangun semangat dan kompetensinya sebagai *agent social of change* bagi kehidupan social, berbangsa dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi (Suacana, 2004). Terlebih menyandang sebagai perguruan tinggi keagamaan, PTKIN mempunyai beban lebih untuk membuktikan bahwa spirit 'agama' bisa menjadi solusi bagi krisis korupsi di Indonesia. Kondisi ekosistem pendidikan antikorupsi menjadi salah satu bukti dari komitmen PTKIN dalam menjalankan fungsinya sebagai motor penggerak integritas sekaligus berperan menghentikan supply koruptor di negeri ini.

Penelitian ini menemukan suatu gambaran bahwa ekosistem pendidikan di lingkungan PTKIN berjalan cukup suportif untuk pendidikan antikorupsi, hanya saja masih belum memenuhi seperti yang diharapkan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis data pada ketiga karakteristik ekosistem pendidikan antikorupsi yang diukur, perguruan tinggi Islam di Indonesia menunjukkan skor rata-rata (3,4833) (kategori skor C). Ini menunjukkan ekosistem pendidikan di PTKIN meskipun cukup kodusif bagi pendidikan antikorupsi, tetapi belum memenuhi expektasi masyarakat. Expektasi masyarakat terhadap PTKIN sangat besar, dengan label Islam seharusnya perguruan tinggi di lingkungan PTKIN bisa menjadi *role model* sebagai pusat pengembangan integritas bangsa dan motor penggerak bagi gerakan melawan korupsi di Indonesia.

Jika ditelisik dari ketiga kriteria pada komponen ekosistem pendidikan antikorupsi, menunjukkan belum adanya kesesuaian antara infrastruktur, struktur dan kultur pendidikan antikorupsi di PTKIN. Hanya pada aspek struktur yang dibuktikan dengan kriteria system tata kelola perguruan tinggi yang bersih dan transparan (*a governance system*) yang menunjukkan capaian skor kategori baik (table 03), meskipun belum ada struktur kelembagaan yang secara

spesifik bergerak di bidang antikorupsi. Pada aspek infrastuktur dan kultur yang ditunjukkan melalui kriteria jaringan penciptaan nilai antikorupsi (*value-creating networks*) dan kesadaran kolektif perlunya gerakan untuk melawan korupsi (*share logic*), masing-masing menunjukkan capaian skor kategori cukup (table 02 dan table 04). Hal ini menunjukkan komitmen pimpinan di lingkungan PTKIN menyelenggarakan tatakelola perguruan tinggi yang baik (*Good University Governance*), belum diikuti oleh semangat untuk membangun jaringan nilai antikorupsi (*value-creating networks*), misalnya dengan menerbitkan kebijakan yang menginstitusikan pendidikan antikorupsi sebagai matakuliah. PTKIN merasa tidak perlu menambah matakuliah pendidikan antikorupsi dalam struktur kurikulum karena meyakini jaringan nilai keislaman yang dikembangkan melalui kurikulum sudah mewadahi keseluruhan nilai-nilai pendidikan antikorupsi. Integrasi nilai-nilai keislaman dalam kurikulum PTKIN tidak secara otomatis dapat mengantarkan pada pemahaman yang baik tentang jenis-jenis korupsi dan nilai-nilai antikorupsi. Demikian halnya aspek kultural yang dibuktikan dengan karakteristik gerakan anti korupsi, kampus belum berperan maksimal menjadi motor penggerak bagi gerakan komunal melawan korupsi. Dengan demikian ekosistem pendidikan di lingkungan PTKIN meskipun sudah cukup suportif bagi pendidikan antikorupsi, tetapi masih perlu dioptimalkan, khususnya pada aspek infrastruktur dan kultur perguruan tinggi.

Pendidikan antikorupsi sebagai pendidikan karakter, memerlukan tahapan penalaran dan internalisasi nilai-nilai karakter antikorupsi (Kadir, 2018). Menurut Suseno pendidikan yang mendukung orientasi nilai adalah pendidikan yang membuat orang merasa malu apabila tergoda untuk melakukan korupsi dan marah bila ia menyaksikannya (Djabbar, 2009). Proses internalisasi nilai dipengaruhi oleh lingkungan social, perkembangan kognitif, empati dan konflik kognitif (Duska dan Whelan, 1982). Oleh karena itu dosen, orang tua dan masyarakat sekitar harus bisa menjadi teladan berperilaku antikorupsi, terutama implementasi dari nilai-nilai kejujuran, keadilan dan tanggungjawab dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil penelitian ini membuktikan integrasi nilai-nilai keislaman dalam kurikulum perguruan tinggi di lingkungan PTKIN belum

sepenuhnya menjamin terbentuknya ekosistem pendidikan yang baik bagi pendidikan antikorupsi. Penelitian ini juga memberikan berspektif lain dari penelitian-penelitian sebelumnya yang mempunyai perspektif berbeda tentang pendidikan antikorupsi khususnya di perguruan tinggi. Penelitian Arifin (2015); Ulya dkk., (2016); Kadir (2018); Kristiono, (2018); Subhan (2019) relative dapat menggambarkan orientasi kajian terhadap pendidikan antikorupsi yang dilihatnya dari perspektif regulasi, integrase nilai-nilai antikorupsi, model, metode dan media pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi. Penelitian yang mengambil perspektif ekosistem pendidikan antikorupsi masih sangat terbatas. Penelitian ini bisa melengkapi dari penelitian sebelumnya yang mengambil focus pada pendidikan karakter antikorupsi, terutama pada jenjang perguruan tinggi.

Bertolak dari hasil penelitian ini, perlu dilakukan optimalisasi peran PTKIN dalam membangun ekosistem pendidikan antikorupsi. Dalam membangun ekosistem antikorupsi harus memperhatikan tiga faktor, yaitu infrastruktur, struktur dan kultur yang kondusif bagi pendidikan antikorupsi. **Pertama;** faktor infrastruktur, yakni adanya kebijakan perguruan tinggi yang menjamin berfungsinya jaringan penciptakaan nilai antikorupsi secara baik, baik melalui matakuliah pendidikan antikorupsi, ataupun kebijakan tentang integrase nilai-nilai antikorupsi dalam kurikulum perguruan tinggi. Pada faktor infrastruktur, diorientasikan mahasiswa tidak saja memahami nilai-nilai antikorupsi, tetapi juga memahami korupsi dan dampak yang bisa ditimbulkannya.

**Kedua:** faktor struktur dibangun melalui tatakelola organisasi perguruan tinggi yang berfungsi dengan baik, dengan tidak memberikan toleransi terjadinya praktek korupsi. Pada faktor struktur diorientasikan untuk memberikan bukti bahwa tatakelola perguruan tinggi diselenggarakan dengan prinsip-prinsip GUG (*Good University Governance*) yang relevan dengan nilai-nilai antikorupsi yang diajarkan kepada mahasiswa. Perguruan tinggi harus dikelola dengan menggunakan prinsip-prinsip keadilan, tanggungjawab dan tarnsparansi sehingga tidak memberikan ruang terjadinya praktek korupsi. Di samping itu, untuk memperkuat faktor structural, perguruan tinggi melengkapi struktur organisasinya dengan



membentuk lembaga yang secara spesifik bergerak di bidang antikorupsi, misalnya pusat kajian korupsi dan sebagainya.

**Ketiga;** faktor kultur dikembangkan melalui gerakan komunal yang berorientasi pada kesadaran dan aksi social untuk melawan korupsi. Kultur antikorupsi harus diinstitusikan menjadi kegiatan rutin di lingkungan kampus. Kampus harus menjadi tempat yang seseorang akan merasa malu jika melakukan praktek korupsi. Kampus harus bisa menjadi tempat yang mengkampanyekan korupsi adalah musuh masyarakat (*common enemy*). Kampus juga harus menjadi pusat bagi gerakan social melawan korupsi baik melalui kegiatan akademik maupun gerakan kesadaran komunal tentang bahaya korupsi.

## **Penutup**

Bertolak dari hasil penelitian ini, krisis korupsi di Indonesia adalah ancaman nyata yang harus mendapatkan perhatian dari semua kalangan, tak terkecuali perguruan tinggi. Perguruan tinggi mempunyai tanggung jawab besar, tidak hanya sekedar berpartisipasi terhadap upaya pencegahan, tetapi juga harus bisa membuktikan sebagai entitas yang mempunyai ekosistem yang baik bagi pendidikan antikorupsi. Masa depan bangsa dan negara Indonesia bisa hancur akibat korupsi. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: (1) perguruan tinggi harus membangun ekosistem pendidikan yang baik bagi pendidikan antikorupsi; (2) perlu memasukkan matakuliah PAK (Pendidikan Antikorupsi) dalam kurikulum perguruan tinggi; (3) perlu regulasi yang mengharuskan setiap dosen untuk mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi dalam setiap perkuliahan. (4) ada gerakan yang massif untuk membangun ekosistem budaya antikorupsi di perguruan tinggi.

Demikian pidato ilmiah saya, mohon maaf atas segala kekurangan.

## Ucapan Terimakasih

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT.
2. Orang tua saya, Bapak Khosim Adnan (alm), Ibu tercinta Hj. Asmiatun yang senantiasa terjaga pada malam hari untuk mendoakan saya. Ini semua adalah bukti mustajabahnya doa ibu.
3. Mertua saya Bapak K.H. Sya'ban (alm) dan Ibu Hj. Syamsiati yang mengikhhlaskan putrinya untu mendampingi hidup saya.
4. Ketua Senat dan para anggota senat
5. Bapak Rektor UIN Walisongo
6. Para Wakil Rektor: WR I (Prof. Mukhsin Jamil, M.Ag.) dan WR III (Dr. H. Arif Budiman, M.Ag.)
7. Kepala Biro AUPK dan AAKK,
8. Para Dekan, Para Wakil Dekan, Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana, Para Ketua Lembaga, Kepala dan Sekretaris SPI, Para Ketua Jurusan/Prodi dan Sekretaris Jurusan/Prodi di Lingkungan UIN Walisongo Semarang
9. Para mitra sejawat akademika, para shahabat dan kolega.
10. Semua keluarga bani Qasim, adik-adik saya, dan juga keluarga bani Sya'ban.
11. Istri tercinta Hj. Chabibah. Terimakasih telah dengan sabar mendampingi saya dan menjadi motivator ketika saya kehilangan semangat. Terimakasih juga pada anak-anak tercinta, (1) Hubbal Kholiq Habbaza, (2) Khuzibayadi Lizzada Kholiq; (3) Mutiara Aghni Luthfa al Kholiq. Semoga Allah menjadikanmu anak-anak yang sholeh sholehah, ahli ilmu dan ahli quraán, semoga menjadi anak-anak yang bisa dibanggakan khususnya saat nanti di hadapan Sang Kholiq (Allah SWT).
12. Semua yang telah membantu saya, terutama Mas Agus Muthohar, mbak Kartika, Mas Munir dan shahabat-shahabat yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Atas jasa mereka, saya tidak bisa membalas budi baik mereka semua. *Jazakumullah khairan jaza.* Amiin.

## REFERENCES

- Ade Imelda Frimayant, 2017, Pendidikan Antikorupsi dalam Pendidikan Agama Islam, *Al Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Volumen 8, No.1.
- Adner, R. 2012. *The Wide Lens: A New Strategy For Innovation*. New York, NY: Portfolio Penguin.
- Akbar, Y, H., Vujic, V. (2014). Explaining corruption: the role of national culture and its implication for international management. *Emerald Insight*, 21 (2), 191-218.
- Anderson, Christopher J. and Tverdova, Yuliya V.; "Corruption, Political Allegiances, and Attitudes toward Government in Contemporary Democracies", *American Journal of Political Science*, Vol. 47 No. 1, January 2003, h. 104.
- Arifin, Siful, 2015, "Model Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi Islam", *Kariman*, Volume 01, No.01.
- Arliman, L. (2017). Konsep dan Gagasan Pengenalan Pendidikan Antikorupsi Bagi Anak dalam Rangka Mewujudkan Generasi yang Bebas Korupsi. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 17(1), 49-64.  
<https://doi.org/10.19109/nurani.v17i1.1348>
- Banu Gundogan, Eby, & Volkan Yuzer, 2014, Capturing Definitions for a Sustainable Distance Education Ecosystem through an Online Delphi Study. DO - 10.4018/978-1-4666-6493-7.ch005
- Begovic, B., 2005, "Corruption: Concepts, types, causes and consequences", *Documentos III* (26): 1-9
- Bowser, Donald, "Corruption Trust, and the Danger to Democratisation in the Former Soviet Union", In *the Transition: Essays on Post Communism*, ed. David Lovell (London: Ashgate Publishers, 2001).
- Catrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, Pendidikan Antikorupsi, *Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika,)
- Chapin, F. Stuart, ect., 2011, *Principles of Terrestrial Ecosystem Ecology*, Springer, New York. DOI 10.1007/978-1-4419-9504-9.
- David, Iyanda, O., 2012, Corruption: Definition, Theories & Concepts, *Arabian Journal of Business and Management Review (OMAN*

Chapter) Vol. 2, No.4, Nov.

- Dewantara, J. A., Hermawan, Y., Yunus, D., Prasetyo, W. H., Efriani, E., Arifiyanti, F., & Nurgiansah, T. H. (2021). Anti-corruption education as an effort to form students with character humanist and law-compliant. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(1), 70–81. <https://doi.org/10.21831/jc.v18i1.38432>
- Diansyah, Febri, dkk., 2011, *Penguatan Pemberantasan Korupsi melalui Fungsi Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*, Indonesia Corruption Watch.
- Djabbar, Faisal, 2009, Tentang Kurikulum Antikorupsi, dalam: <http://smk3ae.wordpress.com/2009/02/02/tentang-kurikulum-antikorupsi-2/>
- Duska R, dan Whelan M. 1982. *Perkembangan Moral: Perkenalan dengan Piaget dan Köhlberg*, Terjemahan Dwija Atmaka, Yogyakarta: Kanisius.
- Ekiyor, H.A 2009 “corruption in Local Government Administration: An Historical summary” as found in Local Government Administration in Nigeria: Old and New Vision,
- Evrensel, A. (2010). Institutional and economic determinants of corruption: a cross-section analysis. *Applied economics letters*, 17, 551-554.
- Friedman, Howard S. & Mariam W. Schustrack; 2006; *Kepribadian: Teori Klasik dan Riset Modern*; Jakarta: Erlangga.
- Gusnardi, 2014, “Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi: Perluakah?”, *Pekbis Jurnal*, Vol.6, No.2, Juli 2014:
- Hakim, Lukman, 2012, “Model Integrasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Kurikulum Pendidikan Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam at Ta’lim*, Vol. 10. No.2.
- Hamzah, A. (1984). *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Harto, Kasinyo, 2014, “Pendidikan Anti-Korupsi Berbasis Agama”, *Jurnal Intizar*, Vol. 20, No.1.
- Hasanah, Sitti, Uswatun, 2018, “Kebijakan Perguruan Tinggi dalam Menerapkan Pendidikan Anti Korupsi”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No.1, Juni.
- Hidayat, Asep Syarifuddin, 2019, “Pendidikan Kampus Sebagai Media

- Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi Bagi Mahasiswa”, *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* Vol. 6 No. 1.
- Hidayat, Asep, Syarifudin, 2019, “Pendidikan Kampus sebagai Media Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi bagi Mahasiswa,” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar’I, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Vol. 6, Nomor 1.
- Jansiti, M., & Levien, R. (2004). *The keystone advantage: What the new dynamics of business ecosystems mean for strategy*. Boston, MA: Harvard Business School Press.
- Kadir, Yusrianto, 2018, “Kebijakan Pendidikan Anti-Korupsi di Perguruan Tinggi”, *Jurnal Gorontalo Law Review*, Vol. 1, No.1, April.
- Katrina Falkner, Rebecca Vivian & Sally-Ann Williams, 2018, *An ecosystem approach to teacher professional development within computer science, Education*. DOI: 10.1080/08993408.2018.1522858.
- Kemendiknas RI [Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia], 2010a, *Pendidikan Karakter Terintegrasi dalam Pembelajaran di Sekolah*. Jakarta: Direktorat PSMP.
- Kemendiknas RI [Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia], 2010, *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter: Pedoman untuk Sekolah*, Jakarta: Kemendiknas RI.
- Ko Kilkon & Moon, S., 2013, *The relationship between religion and corruption: Are the proposed causal links empirically valid?*, Seoul: The Korean Association for Public Administration.
- Kristiono, Natal, 2018, “Penanaman Nilai Antikorupsi bagi Mahasiswa FIS UNNES Melalui Matakuliah Pendidikan Antikorupsi”, *REFLEKSI EDUKATIKA: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, Volume 9 Nomor 1 Desember. ISSN: 2087-9385 (print) dan 2528-696X (online). <http://jurnal.umk.ac.id/index.php/RE>
- Lauren E. Elrick (2020): *The ecosystem concept: a holistic approach to privacy protection*, *International Review of Law, Computers & Technology*, DOI: 10.1080/13600869.2020.178456
- Lickona, Thomas, 1991. *Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility*. New York, Toronto, London, Sydney, Aucland: Bantam books.

- Manion, M. (2004). Lessons for mainland China from anti-corruption reform in Hong Kong. *The China review*, 4 (2), 81-97.
- Manurung, Rosida, Tiurma, 2012, "Pendidikan Anti Korupsi sebagai Satuan Pembelajaran Berkarakter dan Humanistik", *Jurnal Sosioteknologi*, Edisi 27 Tahun 11.
- Mars, M. M., and J. L. Bronstein. 2018. "The Promise of the Organizational Ecosystem Metaphor: An Argument for Biological Rigor." *Journal of Management Inquiry* 27 (4): 382–391.
- McIntosh, R. P. 1985. *The Background of Ecology: Concept and Theory*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Montessori, Maria, 2012, "Pendidikan Antikorupsi sebagai Pendidikan Karakter di Sekolah", *Jurnal Demokrasi*, Vol.11, No.1. <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/view/2561>
- Moore, J. F. 1996. *The Death Of Competition: Leadership And Strategy In The Age Of Business Ecosystems*. New York, NY: HarperBusiness.
- Norris, T. B., and T. Suomela. 2017. "Information in the Ecosystem: Against the "Information Ecosystem"." *First Monday* 22 (9). doi:10.5210/fm.v22i9.6847.
- Perdana, Novrian Satria, 2018, Implementasi Peranan Ekosistem Pendidikan Terhadap Penguatan Pendidikan Karakter Peserta Didik, *JURNAL REFLEKSI EDUKATIKA* 8 (2).
- Pickett, S. T. A., and M. L. Cadenasso. 2002. "The Ecosystem as a Multidimensional Concept: Meaning, Model and Metaphor." *Ecosystems* 5: 1–10.
- Pickett, S. T., and J. M. Grove. 2009. "Urban Ecosystems: What Would Tansley Do?" *Urban Ecosystems* 12: 1–8.
- Porta, Donatella Della, "Social Capital, Beliefs in Government and Political Corruption" in *Disaffected Democracies: What's Trubling the Trilateral Countries?* Eds. Susan Pharr and Robert Putnam (Princeton: Princeton University Press, 2000).
- Prasetya, Danang, dkk., 2021, "Integrasi Pendidikan Antikorupsi dalam Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi," *Citizenship: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 9, No. 2.
- Scott, C. Jamer, (1972) *Comparative Political Corruption*, New Jassey,

Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs.

- Seligson, Mitchell, "The Impact of Corruption on Regime Legitimacy: A Comparative Study of Four Latin American Countries", *Journal of Politics*, Vol. 64 No. 2, 2002, h. 408-33.
- Suacana, Wayan Gede, 2004, *Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi*, Akses di <http://wgsuacana.files.wordpress.com>.
- Subkhan, Edi, 2019, "Pendidikan Antikorupsi Perspektif Pedagogi Kritis", *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6 (1), 15-30. e-ISSN/p-ISSN:2615-7977/2477-118X. DOI: <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.649>.
- Sumaryati. (2020). Penguatan pendidikan antikorupsi perspektif essentialisme. *Jurnal Antikorupsi, INTEGRITAS*, 6(1), 1-14. <https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.408>
- Suradi. (2014). *Pendidikan Anti Korupsi*. Yogyakarta: Gava Media.
- Suryani, I. (2017). Penanaman nilai-nilai anti korupsi di lembaga pendidikan perguruan tinggi sebagai upaya preventif pencegahan korupsi. *Jurnal Visi Komunikasi*, 12(2), 306-323. <https://doi.org/10.22441/jvk.v12i2.413>
- Susanto, P., (2000), *Pengantar Ekologi Hewan*, Direktorat Jenderal Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Suyatmiko, Wawan, Heru, 2021, "Memaknai Turunnya Skor Indeks Perspesi Korupsi Indonesia Tahun 2020", *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 7. DOI: 10.32697/Integritas.v7i1.717
- Tanaka, S. (2001). Corruption in education sector: a suggestion for anticipatory strategy. *International journal of educational management*, 15 (4), 158-166.
- Teece, D. J. 2007. Explicating dynamic capabilities: The nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance. *Strategic Management Journal*, 28(13): 1319-1350.
- Thomas, L., & Autio, E. (2014, October). The fifth facet: The ecosystem as an organizational field. *Academy of Management Proceedings*, 1(2014), 10306.
- Thompson, James.1993. *Developing Education*. Toronto: NewGrace.inc
- Tulchin, Joseph S and Espach, Ralph H. (Ed), *Combating Corruption in Latin America* (Washington DC: Woodrow Wilson Centre Press, 2000).

- Umam, Ahmad, Khoirul, 2014; "Islam, Korupsi dan Good Governance di Negara-Negara Islam", *Jurnal al Ahkam*, Volume 24, Nomor 2, Oktober.
- Vaknin, S. (2009). *Financial crime and corruption* 3rd edition. Lidija Rangelovska: Sam vaknin's United Press International (UPI).
- Van der Valk, A. G. 2014. "From Formation to Ecosystem: Tansley's Response to Clements' Climax." *Journal of the History of Biology* 47: 293–321.
- Wibowo, Agus, 2013, *Pendidikan Antikorupsi Di Sekolah; Strategi Internalisasi Pendidikan Antikorupsi Disekolah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widoyoko, J. D. (2016). Menimbang peluang Jokowi memberantas korupsi: Catatan untuk gerakan anti korupsi. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 2(1), 269–297. <https://doi.org/10.32697/integritas.v2i1.134>
- Woolley, O. 2014. *Ecological Governance: Reappraising Law's Role in Protecting Ecosystem Functionality*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Zaidan, Mihammad Ali, 2017, "Sociological Approach to Eradication Corruption in Indonesia: Alternative to Imprisonment", *Jurnal Pandecta*, Vol. 12, Nomor 1.